

ABSTRACT

Chinese Indonesians have always been at the center of controversial racial conflict between the majority of Indonesians. The complexity of the social, political, and economic relationship between the two groups is under-explored within the realms of academia. Hence, plenty of unaddressed socio-political tension between the two groups in the modern day is left with questions and an ignorant state of mind that only underplays the importance of Indonesia's democratic and pluralistic nation. The pre-existence of New Order era policies has shifted the ways of social, intrapersonal, economic, and political lives of the Chinese Indonesians. This research aims to understand and analyze the effects of New Order era ethnic-based policies of MPRS Decree 1966-1996 and its effects on 21st century Chinese Indonesian ethnic identity. With over 20 in-depth semi-structured interviews conducted with various age groups ranging from the Baby Boomer generation to Generation-Z Chinese Indonesians, they managed to explain the direct and indirect consequences of ethnic-based policies targeted towards them. The data have shown that the more direct impact of the policies resulted in a stronger Chinese ethnic identification. As first-hand experience of oppression in cultural expression, national identity, social life, professional life, and thus their intrapersonal relationship between nationality and ethnicity, are more prominent during 1956-1998. On the other hand, the younger generation of Chinese Indonesians (Millennial and Gen-Z) experience more indirect impact from policies in the form of intergenerational trauma and physical segregation (school, housing, and economy). However, it is important to note that a combination of cultural upbringing, institutions, and social environment are detrimental to shaping their ethnic identity

Key words: public policy, ethnic-based policy, ethnic discrimination, ethnic identity, ethnic socialization, multiculturalism, Chinese cultural identity

ABSTRAK

Warga Tionghoa di Indonesia selalu menjadi pusat konflik rasial yang kontroversial di antara mayoritas masyarakat Indonesia. Kompleksitas hubungan sosial, politik, dan ekonomi antara kedua kelompok ini masih kurang dieksplorasi di bidang akademis. Oleh karena itu, banyak ketegangan sosio-politik yang belum terselesaikan antara kedua kelompok di zaman modern ini, menyisakan pertanyaan dan sikap acuh tak acuh yang meremehkan pentingnya negara Indonesia yang demokratis dan pluralistik. Kebijakan sebelum era Orde Baru telah mengubah cara hidup sosial, intrapersonal, ekonomi, dan politik masyarakat Tionghoa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis dampak kebijakan berbasis etnis era Orde Baru yang dikeluarkan oleh TAP MPRS 1966-1996 dan dampaknya terhadap identitas etnis Tionghoa Indonesia abad ke-21. Melalui lebih dari 20 wawancara semi-terstruktur yang dilakukan kepada berbagai kelompok umur mulai dari generasi Baby Boomer hingga Generasi Z Tionghoa Indonesia, mereka berhasil menjelaskan konsekuensi langsung dan tidak langsung dari kebijakan berbasis etnis yang ditujukan kepada mereka. Data menunjukkan bahwa dampak yang lebih langsung dari kebijakan tersebut menghasilkan identifikasi etnis Tionghoa yang lebih kuat. Sebagai pengalaman langsung penindasan dalam ekspresi budaya, identitas nasional, kehidupan sosial, kehidupan profesional, dan dengan demikian hubungan intrapersonal antara kebangsaan dan etnis, lebih menonjol selama tahun 1956-1998. Di sisi lain, generasi muda Tionghoa Indonesia (Milenial dan Gen-Z) lebih banyak merasakan dampak tidak langsung dari kebijakan berupa trauma antargenerasi dan segregasi fisik (sekolah, perumahan, dan ekonomi). Namun, penting untuk dicatat bahwa kombinasi pendidikan budaya, institusi, dan lingkungan sosial merugikan dalam membentuk identitas etnis mereka.

Kata Kunci: Kebijakan publik, kebijakan berbasis etnis, diskriminasi etnis, identitas etnis, sosialisasi etnis, multikulturalisme, identitas budaya Tionghoa